



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam**  
**Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan**  
**Australia Pasca Kasus Eksekusi *Bali Nine***

Skripsi

Oleh

Salmadita

2017330048

Pembimbing

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam**  
**Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan**  
**Australia Pasca Kasus Eksekusi *Bali Nine***

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Oleh

Salmadita

2017330048

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

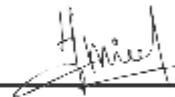


**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Salmadita  
Nomor Pokok : 2017330048  
Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan Australia Pasca Kasus Eksekusi *Bali Nine*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 26 Januari 2021  
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Mireille Marcia Karman, S.Sos, M.Litt

: 

**Sekretaris**  
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol

: 

**Anggota**  
Sapta Dwikardana, Drs., M.Si, Ph.D.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Salmadita  
Nomor Pokok : 2017330048  
Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam  
Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan Australia  
Pasca Kasus Eksekusi *Bali Nine*

Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Bandung, 7 Januari 2020

Pembimbing,

**Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Ratih Indraswari, S.IP., MA.**

## Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmadita

NPM : 2017330048

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan Australia Pasca Kasus Eksekusi *Bali Nine*

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 6 Januari 2021



Salmadita

## ABSTRAK

Nama : Salmadita  
NPM : 2017330048  
Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan Australia Pasca Kasus Eksekusi *Bali Nine*

---

Pergesekan yang terjadi di antara Indonesia dan Australia pada tahun 2015 menyebabkan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia mengalami kerenggangan. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam mengeksekusi dua warga negara Australia yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba bersindiket *Bali Nine*. Indonesia sadar bahwa perlu melakukan upaya untuk meminimalisir ketegangan yang muncul di antara Indonesia dan Australia guna memperkuat kembali hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Upaya yang digunakan oleh Indonesia adalah melalui diplomasi publik. Maka, muncul pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana upaya-upaya diplomasi publik Indonesia dalam memperkuat kembali hubungan bilateral dengan Australia pasca kasus eksekusi *Bali Nine*?”. Analisis penelitian ini menggunakan konsep-konsep diplomasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas J. Cull dan konsep kerangka analisis yang dikemukakan oleh Eytan Gilboa. Penulis memperoleh data bahwa upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia kepada Australia adalah penyelenggaraan Festival Budaya Indonesia di Canberra, Festival *Wonderful Indonesia*, Acara *Indofest*, *Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP)*, dan program *Window on Australia*.

Kata Kunci: Kasus Eksekusi *Bali Nine*, Indonesia, Australia, Diplomasi Publik

## **ABSTRACT**

Name : Salmadita  
NPM : 2017330048  
Judul : *The Efforts of Indonesian Public Diplomacy in Strengthening Bilateral Relationship with Australia Post-Bali Nine Case*

---

*The friction that occurred between Indonesia and Australia in 2015 has caused diplomatic relations between Indonesia and Australia to encounter tensions. The problem was motivated by the action that was taken by the Indonesian Government to execute two Australian citizens who were involved in the Bali Nine drug smuggling case. Indonesia is aware that it is necessary to make efforts to minimize the tension that arises between Indonesia and Australia in order to re-strengthen Indonesia's bilateral relations with Australia. The effort that was used by Indonesia is through public diplomacy. Hence, a research question that arises is "How are the efforts of Indonesian public diplomacy in re-strengthening bilateral relations with Australia post-Bali Nine case?". The analysis of this research uses the concepts of public diplomacy proposed by Nicholas J. Cull and the concept of 'A Framework of Analysis' proposed by Eytan Gilboa. The author obtained data that the public diplomacy efforts done by Indonesia to Australia are Indonesian Cultural Festival in Canberra, Wonderful Indonesia Festival, Indofest, Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP), and Window on Australia program.*

*Keywords: Bali Nine Execution Case, Australia, Indonesia, Public Diplomacy*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur serta kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala rahmat yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul “**Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia Dalam Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan Australia Pasca Kasus *Bali Nine***”. Penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mba Jessica Martha S.Ip., M.I.Pol. selaku dosen pembimbing atas masukan dan saran yang telah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat membawa manfaat bagi bidang keilmuan umum secara teoritis maupun praktik yang kemudian dapat berguna bagi ilmu pengetahuan yang terkait. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dalam menerima kritikan dan saran guna meningkatkan pengolahan data pada hasil akhir penelitian secara maksimal.

Bandung, 6 Januari 2021

Salmadita

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi di HI UNPAR. Secara khusus terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. **Allah SWT**, atas segala izin dan karunia-Nya penulis dapat mencapai proses kehidupan yang luar biasa tahapannya. Penulis bersyukur berkat pertolongan-Nya, penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan lancar.
2. **Keluarga**, terutama Ibu dan adik atas dukungan yang diberikan kepada penulis dalam bentuk moral, kasih sayang, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Khususnya untuk Almarhum Ayah, yang telah membesarkan penulis dengan baik serta sosok yang menginspirasi.
3. **Mba Jessica Martha** selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Muhammad Salafuddin T.**, selaku orang yang telah banyak berperan dalam kehidupan penulis. Terima kasih telah hadir dan menemani penulis sejak awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga skripsi yang sedang dikerjakan juga bisa terselesaikan!
5. **Edenise, Ester, Auradisha, Caitlin, Stella, Zizi, Alya, Jerut:**  
Selaku sahabat-sahabat terdekat penulis yang telah membawa kebahagiaan dan kenangan indah sepanjang masa perkuliahan, kehidupan perkuliahan penulis menjadi lebih berarti dengan keberadaan kalian.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I: Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.2.1. Pembatasan Masalah .....	6
1.2.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kajian Literatur .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	18

1.6.1. Metode Penelitian .....	18
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: Implikasi Vonis Hukuman Mati Pada Duo Bali Nine Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia – Australia.....	21
2.1 Dinamika Hubungan Indonesia-Australia .....	21
2.1.1 Kerja Sama dalam Bidang Politik-Keamanan .....	24
2.1.2 Kerja Sama dalam Bidang Ekonomi .....	27
2.1.3 Hubungan Masyarakat Indonesia dengan Masyarakat Australia (P2P).....	30
2.2 Hubungan Indonesia-Australia Pasca Eksekusi <i>Bali Nine</i> .....	35
2.2.1 Opini Publik Australia terhadap Keputusan Indonesia Menghukum Mati <i>Bali Nine</i> .....	39
BAB III: Diplomasi Publik Indonesia sebagai Upaya Memperkuat Kembali Hubungan Bilateral dengan Australia .....	44
3.1 Upaya-Upaya Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia .....	46
3.1.1 Festival Budaya Indonesia di Canberra.....	47
3.1.2 Festival Wonderful Indonesia.....	50
3.1.3 <i>Australia – Indonesia Youth Exchange Program</i> .....	54
3.2 Upaya-Upaya Diplomasi Publik Aktor Non-Pemerintah Negara Indonesia .....	57
3.2.1 <i>Indofest</i> Adelaide 2015.....	58
3.2.2 <i>Window on Australia</i> .....	62
3.3 Upaya Diplomasi Publik Indonesia terhadap Australia .....	64

## DAFTAR SINGKATAN

ABC	<i>Australian Broadcasting Corporation</i>
AIASA	<i>Australia Indonesia Association in South Australia</i>
ACICIS	<i>Australia Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies</i>
ANZAC	<i>Australia-New Zealand Army Corps</i>
AIYEP	<i>Australia-Indonesia Youth Exchange Program</i>
KEMENPAREKRAF	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
MNC	Media Nusantara Citra

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tangan Jokowi Berlumuran Darah di Halaman Depan Media Australia .....	39
Gambar 3.2 Lukisan Sukumaran Bendera Indonesia Meneteskan Darah.....	40
Gambar 3.3 Opini Publik Australia Terhadap Eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.....	41

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Kerangka Analisis Diplomasi Publik Eytan Gilboa .....	17
---	----

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Indonesia - Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak Indonesia merdeka di tahun 1945. Kedekatan geografis menjadi faktor pendorong bagi kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif terutama untuk menjaga stabilitas kawasan.<sup>1</sup> Meskipun Indonesia dan Australia memiliki perbedaan sistem politik, ekonomi, dan kondisi sosial-budaya, tetapi kedua negara menjaga baik hubungan kerjasama di berbagai sektor tersebut. Dalam bidang maritim, Indonesia dan Australia bekerja sama untuk melindungi perbatasan laut, melakukan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta menjaga keamanan perbatasan laut.<sup>2</sup> Kemudian, Indonesia dengan Australia juga bekerja sama dalam memerangi gerakan ataupun aksi terorisme serta memerangi segala bentuk perdagangan manusia di wilayah perbatasan laut.<sup>3</sup>

Menanggapi isu-isu tersebut, Indonesia dan Australia sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang keamanan, yang mana Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian tentang kerangka kerjasama keamanan (*Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework*

---

<sup>1</sup> “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran” Jurnal DPR RI Vol. 7 no.09/1/P3DI/ (2015): 6 diakses pada 26 Januari 2020

[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf)

<sup>2</sup> Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government “Indonesia Country Brief: Bilateral Relations” <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/indonesia-country-brief.aspx> diakses pada 26 Januari 2020

<sup>3</sup> *Ibid*

*for Security Cooperation*) atau yang dikenal sebagai *Lombok Treaty 2006*.<sup>4</sup> Perjanjian ini menjadi landasan bagi hubungan bilateral tersebut sehingga setiap permasalahan yang sensitif dapat dikelola dengan tolak ukur yang lebih jelas.<sup>5</sup> Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak menjamin keharmonisan hubungan Indonesia dengan Australia yang justru sering mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.<sup>6</sup>

Pasang surut hubungan bilateral Indonesia dengan Australia terkadang disebut sebagai '*strange neighbors*' yang bermakna kerumitan dan kesulitan bagi kedua negara untuk menjaga hubungan bilateral mereka. Melalui julukan tersebut, Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang secara geografis berdekatan tetapi tidak cukup mengenal baik satu sama lain sehingga seringkali timbul salah paham dan pergesekan di antara keduanya.<sup>7</sup> Terlepas dari itu, hubungan antar-masyarakat Australia dengan Indonesia memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan kedua negara. Seperti contohnya pada tahun 2006 ketika terjadi gempa di Bantul, Yogyakarta, sekelompok warga Australia yang tinggal di Yogyakarta merespon dengan menggalang dana untuk membeli kebutuhan pokok korban gempa.<sup>8</sup> Selain itu, sebagian besar pelajar Australia di Yogyakarta dalam program ACICIS, berperan secara sukarela untuk membantu korban gempa bumi. Warga Australia di negara bagian Adelaide juga menggalang dana untuk membantu korban

---

<sup>4</sup> "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran" Jurnal DPR RI Vol. 7 no.09/1/P3DI/ (2015) halaman 6 diakses pada 26 Januari 2020 [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf)

<sup>5</sup> *Ibid* halaman 7

<sup>6</sup> *Ibid* halaman 8

<sup>7</sup> Priyambudi Sulistyanto, Indonesia-Australia Relations in the Era of Democracy: The View from the Indonesian Side, Australian Journal of Political Science (2010) halaman 118

<sup>8</sup> *Ibid* halaman 129

yang berada di Desa Pundong, daerah Bantul.<sup>9</sup> Ketika terjadinya tragedi tsunami di Indonesia, sekelompok warga Australia dan warga Indonesia membentuk organisasi solidaritas yang dinamakan *Network for Tsunami Aceh Inc* (NTAI) dengan tujuan untuk membantu para korban tragedi tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004.<sup>10</sup> Kedua tindakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Australia memiliki hubungan yang erat dan jalinan kerjasama yang kuat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Hubungan Indonesia dengan Australia sempat mengalami ketegangan hingga Australia menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia dikarenakan Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia yang terkait kasus penyelundupan narkoba. Kasus ini bermula ketika sembilan warga negara Australia ditangkap di Bali, karena melakukan upaya penyelundupan lebih dari 8 kilogram narkoba berjenis heroin.<sup>11</sup> Empat di antaranya yaitu Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czugaj ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan bukti paket heroin yang diikat ke tubuh mereka masing-masing. Tiga di antaranya yaitu Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman ditangkap di sebuah hotel di dekat Pantai Kuta dengan bukti sekitar 300gram heroin. Dua lainnya yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di Bandara Ngurah Rai karena terlibat dengan kasus penyelundupan narkoba.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid* halaman 130

<sup>11</sup> “Memori atas Kasus Bali Nine, Sindikat Penyelundup Narkoba”, CNN Indonesia, 22 November 2018 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181121135528-12-348095/memori-atas-kasus-bali-nine-sindikat-penyelundup-narkoba>

<sup>12</sup> *Ibid*

Setahun berikutnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah memfasilitasi ketujuh dalam bentuk menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada ketujuh pelaku penyelundupan. Ketujuh terpidana lainnya dijatuhi hukuman penjara dengan jumlah maksimal seumur hidup. Pemerintah Australia juga sempat beberapa kali mengajukan permohonan grasi kepada Indonesia tetapi ditolak.

Pada tahun 2015, proses sidang masih berlangsung hingga setelah pergantian Presiden dan dibawah Pemerintahan Jokowi, hukuman terhadap warga negara yang terlibat kasus narkoba diperketat. Kemudian, Tony Abbott yaitu Perdana Menteri Australia, mendekati Presiden Jokowi agar membatalkan eksekusi dan memberikan grasi terhadap terpidana. Akan tetapi, eksekusi mati tetap dilaksanakan kepada dua terpidana tersebut pada bulan April bersama dengan.<sup>13</sup> Pendirian Jokowi dalam eksekusi mati tersebut membentuk pandangan Australia terhadap Indonesia sebagai negara yang bertindak tanpa perasaan dan dipimpin oleh Presiden yang tidak berpengalaman serta berani mengorbankan kehidupan warga Australia yang tengah direhabilitasi.<sup>14</sup> Perdana Menteri Australia menarik Duta Besar untuk Indonesia tepat setelah dilaksanakannya eksekusi mati sebagai bentuk protes dan kecaman keras terhadap Indonesia.<sup>15</sup> Perdana Menteri Australia juga memperingati Indonesia bahwa Pemerintah Australia tidak akan mengunjungi

---

<sup>13</sup> John Lee, “Indonesia executions: Why Australia anger will outlive political fallout” CNN Edition, 29 April 2015 <https://edition.cnn.com/2015/04/29/opinions/indonesia-executions-australia/index.html> diakses pada 18 Maret 2020

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup> Denny Armandhanu, “Warganya Dieksekusi, Australia Tarik Dubes dari Indonesia” CNN Indonesia, 29 April 2015 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429055453-113-49921/warganya-dieksekusi-australia-tarik-dubes-dari-indonesia> diakses pada 18 Maret

Indonesia selama beberapa bulan setelah peristiwa eksekusi mati. Akan tetapi, Australia tidak menarik bantuan untuk Indonesia hanya saja Pemerintah Australia tidak menawarkan bantuan khusus untuk sementara waktu.<sup>16</sup>

Presiden Joko Widodo memaklumi respon kecewa dan penyesalan atas tindakan yang dilakukan, tetapi hal tersebut mengartikan bahwa Australia tidak menghargai kedaulatan Indonesia sebagai negara.<sup>17</sup> Bagi Presiden Joko Widodo, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya rasa percaya Australia terhadap Indonesia. Terlepas dari itu, Australia merupakan mitra yang penting bagi Indonesia. Maka dalam rangka memulihkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia yang terputus sejak terjadinya kasus eksekusi mati duo *bali nine*, Indonesia melakukan upaya normalisasi dengan Australia.<sup>18</sup> Dibawah Pemerintahan Joko Widodo, Indonesia meningkatkan hubungan ekonomi untuk menciptakan kepercayaan yang lebih besar melalui *Australia Indonesia Comprehensive Strategic Partnership* khususnya dalam sektor pembangunan dan rekonstruksi.<sup>19</sup> Namun, dalam situasi seperti ini, hubungan antar pemerintah tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa masyarakat dapat berpengaruh dalam mengembalikan eratnya hubungan Indonesia dengan Australia.<sup>20</sup> Oleh sebab

---

<sup>16</sup> John Lee, "Indonesia executions: Why Australia anger will outlive political fallout" CNN Edition, 29 April 2015 <https://edition.cnn.com/2015/04/29/opinions/indonesia-executions-australia/index.html> diakses pada 18 Maret 2020

<sup>17</sup> Aaron L. Connelly, Indonesia foreign policy under President Jokowi, Lowy Institute Analysis Paper (2015) [https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesian-foreign-policy-under-president-jokowi#\\_edn38](https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesian-foreign-policy-under-president-jokowi#_edn38)

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

itu, diplomasi publik memegang peran bagi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pasca eksekusi *Bali Nine*.

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi publik kepada masyarakat Australia untuk meredakan situasi yang tegang di antara kedua negara. Penulis membatasi pembahasan upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia ke masyarakat Australia di bawah kepemimpinan Joko Widodo pada periode pertama tepatnya 2014 - 2019. Alasan penulis meneliti pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, karena kasus eksekusi mati dua warga negara Australia oleh Indonesia terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo periode pertama. Disamping itu, kasus eksekusi mati memberi dampak pada hubungan diplomatik Indonesia dan Australia.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka muncul perumusan masalah yaitu **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi publik Indonesia dalam memperkuat kembali hubungan bilateral dengan Australia pasca kasus eksekusi bali nine?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terhadap Australia untuk memperkuat kembali hubungan Indonesia dan Australia pasca peristiwa eksekusi mati dua warga negara Australia.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi pembaca serta informasi yang dibutuhkan mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Australia, serta upaya Indonesia dalam memperkuat kembali hubungan dengan Australia pasca peristiwa eksekusi mati dua warga negara Australia.

## **1.4 Kajian Literatur**

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa literatur yang dapat membantu untuk menjelaskan mengenai upaya diplomasi yang dilakukan untuk memperbaiki serta memperkuat dengan hubungan dengan negara lain. Literatur pertama yaitu artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Priyambudi Sulistyanto dengan judul *Indonesia–Australia Relations in the Era of Democracy: The View from the Indonesian Side*. Artikel ini menjelaskan hubungan Indonesia dengan Australia dari berbagai aspek seperti sejarah, politik, dan diplomatik. Dinamika hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dipengaruhi perubahan kepemimpinan politik kedua negara yang menimbulkan persepsi yang berbeda

satu sama lain.<sup>21</sup> Contohnya pihak Indonesia merasa hubungan dengan Australia lebih erat dan seimbang ketika Partai Buruh Australia memimpin politik di Australia. Kemudian, hubungan Indonesia dengan Australia mengalami hambatan pada periode jabatan John Howard sebagai Perdana Menteri Australia di tahun 1996-2007.<sup>22</sup> Selama kepemimpinan Howard, Indonesia juga mengalami sejumlah hambatan dalam negeri seperti jatuhnya Soeharto di tahun 1998, munculnya gerakan perubahan demokratis di lembaga-lembaga politik, kemerdekaan Timor Timur, dan konflik-konflik internal.<sup>23</sup> Hubungan Indonesia dengan Australia terjalin dengan kuat karena beberapa alasan, yang pertama karena kedua negara memiliki kedekatan geografis dan sejarah hubungan yang kuat.<sup>24</sup> Kedua, karena Indonesia merupakan mitra politik penting dan strategis bagi Australia.<sup>25</sup> Ketiga, yaitu rasa cemas Australia terhadap identitasnya sebagai bangsa imigran dan sama halnya dengan Indonesia yang memiliki rasa cemas terhadap pecahnya persatuan rakyat Indonesia.<sup>26</sup> Kecemasan tersebut bisa diatasi dengan memunculkan semangat kebersamaan di antara kedua negara agar memperbaiki hubungan negara yang memiliki perbedaan pandangan. Keempat, yaitu hubungan penting antara demokrasi, politik dalam negeri, dan kebijakan luar negeri.<sup>27</sup> Pada intinya, Australia dan Indonesia menyadari pentingnya

---

<sup>21</sup> Priyambudi Sulistyanto, Indonesia-Australia Relations in the Era of Democracy: The View from the Indonesian Side, *Australian Journal of Political Science* (2010) halaman 118

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid* halaman 119

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

kemitraan yang erat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.<sup>28</sup>

Literatur kedua adalah artikel dari jurnal yang ditulis oleh Yiwei Wang dengan judul *Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power*. Artikel ini menjelaskan diplomasi publik yang dilakukan oleh Tiongkok, dan ada tiga tujuan dari Tiongkok melakukan diplomasi publik yaitu sebagai pemikiran strategis, sebagai bentuk *defensive*, dan sebagai alat bagi Tiongkok dalam meningkatkan *soft power*-nya.<sup>29</sup> Secara khusus, Tiongkok memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dan Tiongkok menggunakan diplomasi publik untuk memperkuat hubungan Tiongkok dengan banyak negara.<sup>30</sup> Melalui *Olympic Games 2008* dan *Shanghai World Expo 2010*, Tiongkok berhasil memikat perhatian warga negara lain serta membuat warga negara lain menyukai negara Tiongkok.<sup>31</sup> Pemahaman yang disampaikan pada literatur kedua adalah Tiongkok melakukan diplomasi publik untuk memperkuat kembali hubungan dengan negara-negara lain serta untuk meningkatkan *soft power* negaranya.

Literatur ketiga adalah sebuah bab dari buku yang ditulis oleh Ellen Huijgh dengan judul *The Public Diplomacy of Emerging Powers Part 2: The Case of Indonesia*. Dalam bab ini dijelaskan bahwa diplomasi publik Indonesia ditandai

---

<sup>28</sup> *Ibid* halaman 130

<sup>29</sup> Yiwei Wang, *Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power*, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science Vol 616 no.1 (2008) halaman 263  
<https://doi.org/10.1177%2F0002716207312757> diakses pada 15 Februari 2019

<sup>30</sup> *Ibid* halaman 264

<sup>31</sup> *Ibid*

dengan tiga ciri-ciri yaitu demokratisasi kebijakan internasional; koeksistensi antara islam, demokrasi, dan masyarakat modern; dan pendekatan intermestik antara dimensi internasional dan dimensi domestik yang saling terkait.<sup>32</sup> Ketiga ciri tersebut menjelaskan bahwa diplomasi publik dipandang oleh pemerintah sebagai instrumen bagi proses demokratisasi kebijakan internasional yang berlangsung, dan bahwa kredibilitas diplomasi publik Indonesia saling terkait dengan dukungan masyarakat kalangan bawah dan keterbukaan di luar negeri.<sup>33</sup> Diplomasi publik Indonesia menggunakan pendekatan intermestik atau integratif yaitu faktor-faktor domestik (keberagaman budaya, konstelasi sosial-budaya, islam, stabilitas politik dan keamanan) dapat menentukan hal yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai kekuatan regional dan global.<sup>34</sup> Dari sudut pandang internasional, diplomasi publik Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah yang terus memperjuangkan dimensi intermestik.<sup>35</sup>

Literatur keempat yang dikaji adalah sebuah artikel dari jurnal yang ditulis oleh Cynthia P. Schneider dengan judul *Diplomacy That Works: 'Best Practices' in Cultural Diplomacy*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa acara budaya yang diselenggarakan berulang kali atau secara rutin dapat memberikan peluang untuk memperdalam dan memperluas hubungan negara penyelenggara dengan negara yang ditargetkan. Seperti contohnya, sesi acara *Dutch-American Jazz Jam Session* yang diadakan oleh Amerika Serikat di kedutaan besar Belanda, berhasil

---

<sup>32</sup> Ellen Huijgh, *The Public Diplomacy of Emerging Powers Part 2: The Case of Indonesia* (Los Angeles, Figueroa Press: 2016) halaman 18

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid* halaman 24

<sup>35</sup> *Ibid* halaman 27

membuat publik Belanda menyukai musik *Jazz* serta menyukai budaya Amerika Serikat melalui musiknya. Acara ini menjadi alat diplomasi publik bagi Amerika Serikat karena mengandung ide-ide liberal dan kesetaraan hidup.<sup>36</sup>

Literatur kelima adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Nargress Rotami yang berjudul *Application of Public Diplomacy in Foreign Policy of United States of America*. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan alat kekuasaan bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional.<sup>37</sup> Berbeda dengan diplomasi tradisional yang mana negara menggunakan pola komunikasi yang berdasar pada komunikasi antar pemerintah, sementara diplomasi publik digunakan oleh pihak negara untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat negara tujuan.<sup>38</sup> Selain itu, diplomasi publik dapat dilakukan oleh pihak negara maupun pihak non negara seperti lembaga masyarakat, institusi pendidikan, atau media, sementara pelaksanaan diplomasi tradisional terbatas pada pihak pemerintah dan perwakilannya. Diplomasi publik juga memfokuskan pada perilaku dan persepsi masyarakat, yang mana hal ini menunjukkan bahwa apabila diplomasi publik sejalan dengan diplomasi tradisional, maka memungkinkan negara untuk mencapai kepentingannya serta mempertahankan dasar etika untuk skala regional dan internasional.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Cynthia P. Schneider, “*Diplomacy That Works: ‘Best Practices’ in Cultural Diplomacy*” Cultural Diplomacy Research Series (2003) halaman 10 diakses pada 8 Februari 2020

<sup>37</sup> Nargress Rotami, “*Application of Public Diplomacy in Foreign Policy of United States of America*” Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Journal, Vol.3 No.10 (2014) halaman 190

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

Berdasarkan lima literatur yang telah dipaparkan, seluruhnya saling mendukung bahwa sebagian besar diplomasi publik yang dilakukan bertujuan untuk mendukung negara dan pemerintah dalam upaya membangun, memperkuat dan memperbaiki hubungan dengan negara lainnya yang dituju. Diplomasi publik digunakan untuk mengoptimalkan upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui diplomasi tradisional. Maka dari itu, penulis akan menerapkan pandangan di atas mengenai pentingnya diplomasi publik dalam memperbaiki hubungan antarnegara pada kasus yang penulis gunakan yaitu hubungan Indonesia-Australia pasca kasus Bali Nine.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Menurut pandangan Sukawarsini Djelantik dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, diplomasi dapat diartikan sebagai upaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, ataupun mengirimkan ancaman.<sup>40</sup> Disamping itu, diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam kegiatan diplomasi, yang disusun dalam pertukaran permintaan

---

<sup>40</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2008) halaman 4

dan konsesi antara para pelaku negosiasi.<sup>41</sup> Aktor utama dalam kegiatan diplomasi adalah negara yang diwakilkan oleh seorang diplomat.<sup>42</sup>

Menurut Natalia Bros, *Non-Government Organizations* (NGO) atau organisasi non-pemerintah turut menjadi aktor yang juga memiliki pengaruh dalam hubungan antar negara.<sup>43</sup> Keberadaan mereka dalam hubungan internasional bukan hanya ditinjau dari keterlibatan mereka dalam isu antar negara, tetapi juga mereka memperoleh keterampilan baru dan perkembangan metode untuk mencapai tujuan sebagai NGO. Natalia Bros mengartikan organisasi non-pemerintah sebagai kelompok yang diorganisasikan terdiri dari warga di lingkup lokal, nasional, atau internasional yang bersifat nirlaba dan sukarela.<sup>44</sup> Partisipasi NGO dalam diplomasi publik sebuah negara yang dibagi menjadi dua dimensi, yaitu negara mengakui organisasi sebagai salah satu sumber daya *soft power* sehingga peran NGO diakui, dan partisipasi NGO dalam diplomasi publik juga diakui sebagai pengaruh dari asal negara dengan cara membangun citra dan *national brand* negara tersebut.<sup>45</sup> Di sisi lain, NGO tidak diakui bagian dari negara melainkan sebagai mitra asing yang berada di luar yurisdiksi negara tetapi menjalankan kerja sama dengan negara untuk mencapai keuntungan bagi masing-masing pihak.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Natalia Bros, "Public Diplomacy and Cooperation with Non-Governmental Organizations in The Liberal Perspective of International Relations", *Journal of Education Culture and Society* No.1 (2017) halaman 15

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid* halaman 17

<sup>46</sup> *Ibid*

Diplomasi memiliki beberapa jenis berdasarkan tindakan aktor-aktor yang terlibat, salah satu jenisnya adalah diplomasi publik. Menurut Joseph Nye, diplomasi publik merupakan sebuah perangkat yang digunakan pemerintah untuk berkomunikasi dan memikat masyarakat luar negeri melalui mengerahkan potensi sumber daya negara melalui penyiaran, mensubsidi ekspor budaya, program-program pertukaran pelajar atau pertukaran budaya, dan semacamnya.<sup>47</sup> Menurut Gifford D. Malone, diplomasi publik merupakan bentuk komunikasi langsung dengan masyarakat negara lain dengan memengaruhi opini mereka lalu setelah opini masyarakat terbentuk maka kemudian opini masyarakat akan memengaruhi pemerintah negara tersebut.<sup>48</sup>

Menurut Nicholas J. Cull, diplomasi publik adalah suatu proses yang dilakukan oleh aktor internasional untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri dengan melibatkan masyarakat negara lain dan telah memperoleh mata uang internasional sejak akhir perang dingin.<sup>49</sup> Diplomasi publik berdasarkan praktiknya digolongkan ke lima instrument yaitu *listening*, *advocacy*, *cultural diplomacy*, *exchange diplomacy*, dan *international broadcasting*. *Listening* adalah suatu cara dari diplomasi publik yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi dan data-data mengenai pendapat masyarakat tentang negara tersebut kemudian data yang telah diperoleh digunakan untuk menentukan kebijakan, aktivitas, dan

---

<sup>47</sup> *Ibid* halaman 99

<sup>48</sup> Gifford D. Malone, *Managing Public Diplomacy*, *The Washington Quarterly* Vol.8 (1985) halaman 199

<https://doi.org/10.1080/01636608509450301> diakses pada 8 Februari 2020

<sup>49</sup> Nicholas J.Cull, *Public Diplomacy: Taxonomies and Histories*, Vol. 616 (2008) halaman 31  
<https://doi.org/10.1177%2F0002716207311952> diakses pada 9 Februari 2020

tindakan yang dibuat.<sup>50</sup> Kegiatan *listening* mencakup pengambilan pendapat dari kelompok yang ditargetkan. *Advocacy* yaitu cara yang kedua dari diplomasi publik yang dilakukan oleh negara dengan secara aktif komunikasi dan promosi ke masyarakat negara lain sehingga bisa menyampaikan kepentingan dan tujuan negaranya. Kegiatan *advocacy* biasanya bersangkutan dengan pers kedutaan.<sup>51</sup> Contoh dari *advocacy* adalah Indonesia ketika menjadi anggota dewan keamanan PBB, menyatakan bahwa Batik milik dan berasal dari Indonesia. Kemudian, *Exchange Diplomacy* yaitu mengelola lingkungan internasional dengan mengirimkan warga negaranya ke luar negeri dan sebaliknya menerima warga negaranya dari luar negeri dengan kepentingan studi atau akulturasi.

Instrumen *exchange diplomacy* mencakup program-program akademik baik dari pemerintah ataupun non-pemerintah.<sup>52</sup> *International Broadcasting* yaitu cara lain dari diplomasi publik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan dan menyiarkan melalui media seperti televisi, radio, koran, atau media sosial agar bisa terlibat dengan warga negara lain.<sup>53</sup> Contohnya seperti menyiarkan bahasa asing di saluran radio dalam jangka pendek. Kelima yaitu cara *Culture Diplomacy* dari diplomasi publik yang dilakukan dengan upaya mengelola lingkungan internasional melalui mempromosikan budaya negaranya.<sup>54</sup> Contoh kegiatan *cultural diplomacy* adalah kunjungan wisata seni internasional yang didanai oleh negara.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid* halaman 32

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid* halaman 33

<sup>53</sup> *Ibid* halaman 34

<sup>54</sup> *Ibid* halaman 39

<sup>55</sup> *Ibid* halaman 35

Menurut Eytan Gilboa, diplomasi publik memiliki kerangka analisis untuk mengkategorikan upaya-upaya diplomasi publik. Kategori tersebut antara lain adalah Waktu (*Time*), Tujuan (*Purpose*), Media atau opini publik (*Media/Public Opinion*), Peran Pemerintah (*Government*), Instrumen Diplomasi Publik (*Public Diplomacy Instrument*).<sup>56</sup> Upaya diplomasi publik pada kategori waktu dibagi berdasarkan jangka waktu keberlangsungan diplomasi publik tersebut. Jangka waktu diplomasi publik pada abad ke-21 terbagi menjadi tiga golongan yaitu *Immediate*, *Intermediate*, dan *Long*.

Perbedaan pada masing-masing kategori waktu terletak pada tujuannya, besar atau kecilnya keterlibatan Pemerintah, dan alat diplomasi publik yang digunakan.<sup>57</sup> Tahap *Immediate* bertujuan untuk memperoleh reaksi (*Reactive*) dari peristiwa dalam hitungan jam atau beberapa hari dengan tujuan mengurangi dampak buruk insiden yang terjadi atau mengambil kesempatan melalui pelaksanaan kegiatan diplomasi publik. Pada tahapan ini, pemerintah berperan aktif baik menyiapkan, menyelenggarakan, hingga mengevaluasi kegiatan diplomasi publik. Instrumen diplomasi publik yang tergolong dalam *Immediate* yaitu *Advocacy*, *International Broadcasting*, dan *Cyber Public Diplomacy*. Berikutnya, tahap *Intermediate* yang bertujuan untuk mencapai perencanaan proaktif (*Proactive*) dan penerapan kebijakan.<sup>58</sup> Dalam tahapan ini, sebagian kegiatan diplomasi publik dijalankan pemerintah dan sebagian lainnya dijalankan oleh aktor non-pemerintah yang mana hasilnya bertahan selama berminggu-minggu atau

---

<sup>56</sup> Eytan Gilboa, Searching for a Theory of Public Diplomacy: The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science (2008) halaman 72

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

berbulan-bulan.<sup>59</sup> Instrumen diplomasi publik pada tahap *Intermediate* adalah *International Public Relations, Corporate Diplomacy, dan Diaspora Public Diplomacy*.<sup>60</sup> Selanjutnya, *Long-term* yang serupa dengan diplomasi tradisional dengan tujuan memperoleh sikap positif dan kepercayaan dari masyarakat seluruh dunia.<sup>61</sup> Kegiatan diplomasi publik *long-term* menargetkan upaya untuk bertahan selama bertahun-tahun dan memiliki tujuan untuk membangun hubungan (*Relationship*) yang saling menguntungkan dan menimbulkan rasa kepercayaan dengan negara-negara lain.<sup>62</sup> Upaya yang dilakukan harus berlangsung selama bertahun-tahun atau diadakan setiap tahun, dengan menggunakan instrumen diplomasi seperti *Cultural Diplomacy, Exchanges, dan Branding*.<sup>63</sup>

Pembagian dimensi waktu tersebut turut membentuk membagi peran Pemerintah dalam diplomasi publik menjadi tiga bagian yaitu *closely linked, partially linked, remotely linked*.<sup>64</sup> Pemerintah pada bagian *closely linked* terlibat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan diplomasi publik dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tersebut, termasuk.<sup>65</sup> Kemudian, *Partially linked* merupakan kegiatan yang melibatkan Pemerintah sebagai aspek dalam berjalannya kegiatan tersebut. Peran dan tugas pihak non-pemerintah dalam bagian ini lebih besar dibandingkan dengan peran yang dijalankan Pemerintah.<sup>66</sup> Pada bagian *Remotely*

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Ratih Indraswari dan Yulius P. Hermawan, *Diplomasi Publik dan Nation Branding*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan (2015) halaman 6

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid* halaman 7

*Linked* kegiatan yang diselenggarakan hanya melibatkan sedikit peran Pemerintah atau sama sekali tidak melibatkan Pemerintah.<sup>67</sup>

Tabel 1.1 Kerangka Analisis Diplomasi Publik Eytan Gilboa

Range	Immediate	Intermediate	Long
Purpose	Reactive	Proactive	Relationship
Government	Closely Linked	Partially Linked	Remotely Linked
Public Diplomacy Instrument	Advocacy; International broadcasting; Cyber PD	International public relations; corporate diplomacy; Diaspora PD	Cultural Diplomacy; Exchanges; Branding

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menyajikan data dalam bentuk narasi serta mengkaji data-data sekunder resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia/Pemerintah, Organisasi Non-Pemerintah yang bersangkutan dan dokumen-dokumen sekunder lainnya. Penulis akan melakukan pengamatan perilaku masyarakat, memeriksa dokumen tertulis, dan mempelajari gambar visual.<sup>68</sup> Metode penelitian kualitatif menginterpretasikan data untuk menetapkan signifikansi atau makna yang koheren melalui bentuk kata-kata, termasuk kutipan

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

atau gambaran mengenai peristiwa tertentu.<sup>69</sup> Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada konteks sosial yang ditinjau dari tindakan sosial, peristiwa, atau suatu pernyataan sehingga metode kualitatif tepat dalam penelitian ini.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis internet. Metode berbasis internet dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber data yang diperoleh dari internet.<sup>70</sup> Selain itu, penggunaan internet untuk mendukung dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang akurat tentang topik penelitian. Studi literatur juga akan menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan menjadikan literatur (buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian) sebagai acuan dalam penelitian ini.<sup>71</sup>

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab 1 membahas pendahuluan dari penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

---

<sup>69</sup> *Ibid* halaman 110

<sup>70</sup> *Ibid* halaman 179

<sup>71</sup> *Ibid*

Bab 2 memaparkan implikasi vonis hukuman mati pada dua warga Australia terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Bab 3 mengaitkan serta menganalisis upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan dengan teori yang digunakan dan tertulis dalam kerangka pemikiran.

Bab 4 membahas kesimpulan analisis serta penutup dari penelitian.